



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.292, 2019

KEMEN-ATR/BPN. Renstra Tahun 2015-2019.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN

AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan agraria dan tata ruang Tahun 2015-2019 berpedoman kepada Rencana Panjang Jangka Mengengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  - b. bahwa penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 menggunakan data sebelum restrukturisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan bidang pertanahan dan tata ruang sesuai dengan hasil evaluasi dan arahan Presiden Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN  
 TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN  
 PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Strategis	<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan</b>						202.114	995.537	1.789.405	1.811.078	2.801.420	Direktorat Jenderal: (1)Penataan Agraria (2)Hubungan Hukum Kesagrariaan
	Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	10,00%	10,00%	10,00%	22,25%	25,00%						
Sasaran Strategis	<b>Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan</b>						920.189	570.639	165.737	445.714	2.355.292	Direktorat Jenderal : (1)Tata Ruang (2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
	Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang	10,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%						
	Persentase Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah	30,00%	40,00%	50,00%	55,00%	60,00%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Strategis	Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)						4.332.225	5.443.440	6.847.133	9.547.957	13.095.372	Direktorat Jenderal : (1)Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, (2)Tata Ruang, (3)Infrastruktur Keagrariaan, (4)Hubungan Hukum Keagrariaan (5)Pengadaan Tanah
	Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan	10,00%	15,00%	20,00%	35,00%	50,00%						
	Persentase cakupan peta dasar pertanahan	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%						
	Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%						
	Jumlah						5.454.528	7.009.616	8.802.275	11.804.749	18.252.085	
<b>Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang</b>							527.282	347.476	74.330	220.906	1.267.500	
<b>Sasaran Program</b>	<b>Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>											
	Jumlah RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN	1	-	1	6	6						Direktorat Jenderal: (1)Tata Ruang (2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
	Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN	16	5	1	5	6						
	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya	-	-	4	5	6						
	Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mendapatkan fasilitas pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan	-	4	-	-	-						
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Kebijakan Teknis, Program dan Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja</b>						52.728	42.215	7.433	22.091	126.750	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
Sasaran Kegiatan 1	Tersedianya Kebijakan Teknis, Program dan Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja (Dokumen)															
	Menyusun Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang (RENC, MANF) (Dok)	8	8	2	8	8										
	Menyusun Kebijakan Teknis, Program dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja (RENC, MANF, TAWAS, SET) (Dok)	3	3	3	3	3										
	Menyusun data dan informasi kebijakan serta pelaksanaan program (Dok)	1	1	1	1	1										
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang dan Harmonisasi peraturan perundangan sektoral Bidang Tata Ruang</b>										105.456	69.124	14.866	44.181	253.500	
Sasaran Kegiatan 2	Keterpaduan program pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN serta Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah															
	Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi harmonisasi peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang (SET)	1	1	1	1	1										
	Menyusun kajian dan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah (MANF)	5	5	1	5	5										
	Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah (MANF)	5	5	1	5	5										
	Melaksanakan Sinkronisasi Program Sektor dalam perwujudan RTR (MANF)	5	5	1	5	5										

Direktorat  
Jenderal:  
(1)Tata Ruang  
(2)Pengendalian  
Pemanfaatan  
Ruang dan  
Pengawasan  
Tanah



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Memetakan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan (MANF)	5	5	1	5	5							
	Melaksanakan penataan ruang KSN (MANF)	5	5	1	5	5							
<b>Kegiatan 3</b>	<b>RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN</b>						184.549	120.968	26.016	77.317	443.625		
Sasaran Kegiatan 3	RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, RTR dan KSN												
	Menyusun RTR Pulau/Kepulauan (RENC)	10	10	4	10	10							
	Menyusun RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN (termasuk revisi RTR KSN Jabodetabekpunjur)	10	10	4	10	10							
	Menyusun RTR dan RDTR Kawasan perbatasan negara (RENC)	3	3	1	3	3							
<b>Kegiatan 4</b>	<b>Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan</b>						47.455	31.106	6.690	19.882	114.075		
Sasaran Kegiatan 4	Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan												
	Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan perkotaan dan perintisan kota-kota baru (TAWAS)	10	10	2	10	10							
	Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan perdesaan (TAWAS)	10	10	2	10	10							

Direktorat Jenderal:  
(1)Tata Ruang  
(2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengusahaan Tanah

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan baru termasuk kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim (TAWAS)	5	5	1	5	5							
	Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan ekonomi (TAWAS)	5	5	1	5	5							
<b>Sasaran Program</b>	<b>Terwujudnya Penyeleenggaraan Pembinaan Penataan Ruang daerah</b>												
	Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah	33	33	33	33	33							
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah</b>						79.092	51.843	11.150	33.136	190.125		
Sasaran Kegiatan 1	Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah												
	Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)	33	33	33	33	33							
	Memberikan Persetujuan Substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)	33	33	33	33	33							
	Melaksanakan Pembinaan Pemenuhan SPM di Provinsi/Kabupaten/Kota/Perkotaan (BINDA)	33	33	33	33	33							
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Forum pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah</b>						58.001	32.219	8.176	24.300	139.425		

Direktorat Jenderal:  
(1)Tata Ruang  
(2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Sasaran Kegiatan 2	Forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mendapatkan fasilitas dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah	10	10	1	10	10							Direktorat Jenderal: (1)Tata Ruang (2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
	Melaksanakan program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha (BMDA)	10	10	1	10	10							
<b>Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan</b>							318.458	197.000	623.269	3.744.424	5.644.834		
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatnya Kepastian Letak Dan Batas-Batas Bidang Tanah Dan Kepastian Angka Luasnya Yang Mendukung Proses Penegakan Hukum</b>												
	Persentase Cakupan Bidang Tanah Yang Terpetakan	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%							
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Cakupan Wilayah Peta Dasar Pertanian</b>						259.430	204.670	258.681	1.766.642	2.836.384		Direktorat Jenderal: Infrastruktur Keagrariaan
Sasaran Kegiatan 1	Peta Dasar Pertanian												
	Skala 1:2500 (Ha)	14.985.000	8.490.000	10.845.000	13.795.000	18.535.000							
	Skala 1:1000 (Ha)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000							
	Pembuatan Peta Dasar untuk RDTR skala 1:5000	75 lokasi	75 lokasi	75 lokasi	75 lokasi	75 lokasi							
	Peta Batas Kawasan/Batas Wilayah	-	-	61.000 Km/Tugu	61.000 Km/Tugu	61.000 Km/Tugu							
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Peta Tematik</b>												
Sasaran Kegiatan 2	Tersedianya Peta Tematik						59.028	249.552	364.588	1.977.782	2.808.450		
	Survei dan Pemetaan Tematik (Ha)	4.771.412	19.000.000	34.652.000	8.632.653	18.488.516							
	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Obyek Ruang dan Perairan (Ha)	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	3.660.250							
	Peta Bidang Tanah Sertipikat	-	-	-	7.000.00	9.000.000							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan</b>	<b>Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset</b>						1.317.960	1.845.824	2.784.438	1.519.565	2.388.468	
<b>Sasaran Program</b>	Persentase Tanah dan Ruang Yang Terdaftar	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%						
	Jumlah Masyarakat Pemilik Sertipikat Yang Menerima Akses Reform	10%	10%	10%	10%	10%						
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Sertipikat Tanah yang diterbitkan</b>											
Sasaran Kegiatan 1	Sertipikat Yang di Terbitkan											
	Pendaftaran Hak Atas Tanah	922.093	1.100.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000						
<b>Kegiatan 2</b>	Akses ke Sumber-sumber Ekonomi Yang diberikan kepada Penerima Manfaat											
Sasaran Kegiatan 2	Penerima Manfaat											
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
<b>Program Penataan Agraria</b>	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilihan Tanah Serta Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Secara Optimal</b>						142.178	939.537	1.742.610	1.744.610	1.746.148	
<b>Sasaran Program</b>	Persentase Pencapaian Penataan Uang Ketimpangan Penguasaan Pemilihan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	10%	10%	15%	15%	15%						
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Redistribusi Tanah</b>						56.871	448.373	841.879	842.859	843.612	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target						Alokasi Anggaran						Unit Organisasi Pelaksana			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
Sasaran Kegiatan 1	Bidang Tanah Yang diredistribusi Pelaksanaan Redistribusi Tanah	107.150	975.000	975.000	1.000.000	1.000.000											
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Konsolidasi tanah</b>						13.000	12.000	12.000	12.000	12.000						
Sasaran Kegiatan 2	Bidang Tanah Yang di Konsolidasi	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500											
<b>Kegiatan 3</b>	<b>Inventarisasi Tanah</b>																
Sasaran Kegiatan 3	Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penguasaan dan Pemafaatan Tanah																
	Pelaksanaan IP4T (Bid)	144.900	4.515.360	4.515.360	4.515.360	4.515.360	72.307	479.164	888.731	889.751	890.535						
	Pelaksanaan Inventarisasi WP3WT (SP)	148	165	65	197	165											
	Penyusunan Neraca PGT(Kab/Kota)	58	105	70	92	105											
	<b>Program Pengadaan Tanah</b>						59.936	56.000	46.795	66.468	1.055.273						
<b>Sasaran Program</b>	<b>Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</b>																
	Tersedianya Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum																
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Pelaksanaan Pengadaan Tanah Instansi</b>																
Sasaran Kegiatan 1	Tersedianya Informasi Nilai Tanah						29.968	31.224	42.695	53.300	53.300						
	Pembuatan peta zona nilai tanah	775.000	800.000	844.000	3.259.000	3.259.000											
	Pembuatan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan	21.100	25.000	12.500	10.000	25.000											
	Menetapkan SK Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD	1	1	1	1	1											
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Lembaga Penyedia Tanah</b>						28.170	-	-	-	1.000.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Sasaran Kegiatan 2	Terbentuknya Lembaga Penyedia Tanah												
	Pembentukan Lembaga Penyedia Tanah	-	-	-	1	1							
<b>Kegiatan 3</b>	<b>Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum</b>												
Sasaran Kegiatan 3	Cadangan tanah untuk kepentingan umum	1	1	1	1	1	1.798	24.776	4.100	13.168	1.973		Direktorat Jenderal: Pengadaan Tanah
	Inventarisasi Tanah untuk kepentingan umum	-	-	-	-	-							
	Pembebasan tanah												
							392.907	223.163	91.407	224.808	1.087.792		
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang</b>												
<b>Sasaran Program 1</b>	Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota	20%	20%	20%	20%	20%							
	Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Dok)	1	1	1	1	1							Direktorat Jenderal: Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota</b>						216.099	91.000	14.215	20.834	598.286		
Sasaran Kegiatan 1	Implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov							
	Melakukan Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus dan Pemenuhan SPM Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota												
	Melakukan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target						Alokasi Anggaran						Unit Organisasi Pelaksana	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	Melakukan Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov									
	Melakukan Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov									
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang</b>						137.517	88.663	40.478	74.824	380.727				
Sasaran Kegiatan 2	Penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang														
	Melakukan Puibaket dan Penyidikan terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	10	10	2	20	20									
	Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov									
<b>Sasaran Program 2</b>	<b>Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar</b>														
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Peranahan	1	1	1	1	1									
	Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	1	1	1	1	1									
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanian</b>						43.220	13.000	20.000	81.791	119.657				
Sasaran Kegiatan 1	Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanian														
	Menyusun data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola	1	1	1	1	1									
	Menyusun Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah	1	1	1	1	1									
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar</b>						35.362	30.500	16.714	47.359	97.901				

Direktorat Jenderal: Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Tanah

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target						Alokasi Anggaran						Unit Organisasi Pelaksana			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
Sasaran Kegiatan 2	Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar																Direktorat Jenderal: Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
	Menyusun Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara	1	1	1	1	1											
	Menyusun Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	1	1	1	1	1											
<b>Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang</b>											47.191	59.551	47.176	84.494	54.760		Direktorat Jenderal: Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah
<b>Sasaran Program</b>	<b>Berkurangnya Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan</b>																
	Jumlah penyelesaian sengketa, konflik dan perkara	890 Kasus	890 Kasus	890 Kasus	890 Kasus	890 Kasus											
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Penanganan sengketa, konflik tanah dan ruang</b>										33.034	41.686	34.176	71.077	38.332		
Sasaran Kegiatan 1	Penanganan sengketa, konflik tanah dan ruang																
	Mediasi dan fasilitasi potensi sengketa, konflik tanah dan ruang	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus											
	Penanganan sengketa tanah dan ruang	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus											
	Penanganan konflik tanah dan ruang	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus											
Kegiatan	Penanganan perkara tanah dan ruang										14.157	17.865	13.000	13.417	16.428		
Sasaran Kegiatan	Penanganan perkara tanah dan ruang																
	Penanganan perkara TUN	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus											
	Penanganan perkara perdata	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	200 Kasus											
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>											2.638.616	3.329.065	3.380.250	4.186.057	4.982.310		Sekretariat Jenderal
Sasaran Program	Terwujudnya Operasional dan Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional																



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	3.329.065	3.380.250	4.186.057	4.690.611	Sekretariat Jenderal	
<b>Kegiatan</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN</b>						2.638.616					
Sasaran Kegiatan	Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN Berjalan Lancar dan Aman											
	Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	10.000	12.000	13.417	25.000	Inspektorat Jenderal	
<b>Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/ BPN</b>												
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaann Tugas pada Semua Unit Kerja Kementerian ATR/BPN</b>											
	Presentase berkurangnya penyimpanan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Kementerian ATR/BPN	10%	10%	10%	10%	10%						
<b>Kegiatan</b>	<b>Terlaksananya pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional</b>											
Sasaran Kegiatan	Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional						8.000	10.000	10.417	20.000		
	Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat						
<b>Kegiatan</b>	<b>Terlaksananya pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional</b>						2.000	2.400	3.000	5.000		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana								
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019									
Sasaran Kegiatan	Pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional																			Inspektorat Jenderal
	Pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat														

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL